

Revitalisasi Objek Wisata Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD)

Parman¹, Ismail²,

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Universitas Musamus Merauke
parman86@unmus.ac.id, ismail@unmus.ac.id

Abstract

Lampu Satu beach tourism is an icon of beach attractions in Merauke regency which has strategic value. This research aims to optimize existing coastal tourism potential assets so that they can grow sustainably through the Asset Based Communities Development (ABCD) approach. The ABCD approach aims to maximize the potential of physical and non-physical assets at the location of the Lampu Satu tourist attraction. The type of research is qualitative with primary data through data collection techniques, namely observation and in-depth interview interviews, which are then analyzed with a descriptive analysis approach, while secondary data comes from literature reviews both from books and journals that are related and relevant to the substance of the research conducted. The results showed that on Lampu Satu Merauke beach, there are several assets that have not been optimized such as historical assets, individual assets, facilities and infrastructure and natural resource assets. One of the other efforts to maximize other tourism potential is to increase social media understanding and digital access to tourism managers, as a tourism promotion tool. In addition, education and socialization about the management of organic waste into compost is part of the sustainable tourism development process.

Keywords: Revitalization, Beach Tourism, Asset Based Community Development (ABCD)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 (dua) di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 99.083 km setelah Kanada yang panjang pantainya 202.080 km. Ribuan pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang saling terhubung oleh selat dan laut dengan jumlah pulau tercatat 16.056 (Masjhoer, 2020). Sumber daya kelautan dan daerah pesisir memiliki potensi yang sangat besar dengan 75 % wilayah Indonesia yang selama ini telah menjadi sumbangan yang berarti terhadap keberhasilan pembangunan nasional berupa penyedia bahan dasar produksi, membuka kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, sebagai bagian devisa negara dan stimulus pembangunan daerah (Richter et al., n.d.). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Indonesia dikenal dengan Negara Bahari yang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki keunggulan kompetitif, keunggulan kooperatif, dan keunggulan kompetitif, salah satunya adalah potensi pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang serius dikembangkan saat ini, yang bertujuan untuk menjadi salah satu sumber pendapatandaerah. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pariwisata Indonesia terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022 Indonesia berhasil meraih peringkat ke-32 tingkat dunia menurut *Travel and Tourism Development Index* (TTDI). Secara makro pariwisata Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 2022 dari 2,4 persen pada tahun 2021 menjadi 3,6 persen, peningkatan nilai devisa pariwisata 2022 dari 0,52 persen miliar dolar AS pada tahun 2021 menjadi 4,26 miliar dolar AS pada tahun 2022. Selain dari pada itu, sektor pariwisata ini terbukti terciptanya lapangan kerja dan terjadi kenaikan 2022 dari 22,26 juta orang pada tahun 2021 menjadi 22,98 pada tahun 2022 (Novitasari, 2022).

Keberhasilan sektor pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Oleh sebab itu, dunia pariwisata yang melibatkan banyak komponen seperti pemerintah, pengusaha, dan yang lainnya akan memberikan dampak terhadap eksistensi objek wisata yang ada. Dampak yang mungkin terjadi dapat bersifat positif maupun negatif tergantung dengan pengelolaan yang diperankan oleh pemangku kepentingan. Namun tidak kalah pentingnya adalah keberadaan masyarakat lokal sebagai basis pengembangan wisata itu menjadi hal urgen (Ismail & Mas, 2022), karena padadasarnya pengembangan wisata harus memberikan implikasi yang positif bagi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal.

Merauke merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua Selatan dengan luas wilayah 46.791,63 Km². Kondisi geografis wilayah datar yang sangat luas dan garis pantai yang terpanjang dengan luas perairan mencapai 5.089,71 Km². Hal ini menyebabkan daerah Kabupaten Merauke memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu kawasan mampu menjadi faktor

pendorong perekonomian (Hendrik et al., 2021)

Pantai Lampu Satu merupakan salah satu pantai yang memiliki potensi wisata yang berada Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke. Pantai Lampu Satu yang letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota Merauke, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadikan sebagai tempat pilihannya dalam berwisata, Sehingga diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam pendistribusian kekayaan (pendapatan) masyarakat secara merata dari masyarakat kota dengan masyarakat lokal pesisir pantai melalui instrumen atau paket wisata yang ditawarkan oleh masyarakat lokal sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan pendekatan *asset based community development* (ABCD), pantai Lampu Satu memiliki asset-aset yang potensial untuk diberdayakan dan kembangkan untuk mendukung revitalisasi objek wisata pantai yang bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal pesisir. ABCD merupakan sebuah model pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang menitik beratkan pada optimalisasi pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki berupa asset manusia, sumber daya alam yang ada, asset fisik atau asset infrastruktur, asset formal dan asset informal oleh masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar (Rinjani et al., 2024).

Pendekatan teori *asset based community development* sebagai upaya optimalisasi potensi asset untuk revitalisasi objek wisata pantai Lampu Satu untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga digunakan oleh peneliti sebelumnya, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Amelia Rahayu, dkk. Dengan hasil penelitian bahwa pengembangan wisata dilakukan dengan pendekatan ABCD, secara langsung atau tidak langsung telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, psikologi, dan sosial kemasyarakatan ((Rahayu et al., 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Theofillius Baratova Axellino Kristanto dan Ayu Aishya Putri dengan hasil penelitian bahwa dengan menggunakan teori ABCD (*asset based community development*) maka akan bisa dilihat gambaran secara keseluruhan akan suatu aset atau potensi yang dimiliki suatu daerah guna meningkatkan suatu pengembangan wisata dalam skala yang lebih besar (Kristanto & Aishya Putri, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Berto Addriyanto, Muh. Ilham dan Ella Wargadinata, menunjukkan bahwa *community based tourism* (pengembangan wisata berbasis masyarakat) di kabupaten Pelalawan provinsi Riau belum maksimal, dilihat dari indikator dukungan pemerintah, tingkat partisipasi stakeholder minim, dan penggunaan sumber daya lokal serta penguatan institusi lokal belum maksimal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Aulia Rahma, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode *asset based community development* mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat akan potensi dan aset yang dimiliki oleh desa bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Bahkan mereka telah bisa

merencanakan terciptanya desa wisata di Desa Tritik Kabupaten Nganjuk (Rahma, 2021)

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan, pada kesimpulan awal bahwa objek wisata Lampu Satu terdapat potensi asset yang memadai dan memiliki potensi yang signifikan dalam menunjang pengembangan wisata pantai dan menjadi tumpuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Namun sejauh ini potensi asset yang ada belum sepenuhnya maksimal diberdayakan, sehingga baik langsung maupun tidak langsung masih belum memberikan nilai nyata memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Pantai Lampu Satu.

Perlu penguatan kapasitas masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya alam yang ada guna meningkatkan kapasitas objek wisata. Keselarasan antara potensi yang ada dan juga kapasitas masyarakat dan sarana dan prasarana merupakan suatu keniscayaan dalam pengembangan objek wisata pantai Lampu Satu. Untuk itu, peran masyarakat, pemerintah Desa, pemerintah Kelurahan, Dinas terkait dan pihak swasta untuk berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi asset yang ada. Oleh sebab itu, penelitian berbasis riset ini dilakukan dengan tujuan untuk medeskripsikan dan menganalisis potensi asset yang ada sebagai upaya “Merevitalisasi Objek Wisata Lampu Satu Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development*”

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Revitalisasi Objek Wisata

Keberadaan wisata dalam suatu kampung menjadikan masyarakat harus mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Perubahan terjadi akibat adanya potensi suatu kampung yang diminati oleh masyarakat. Hal ini penting untuk pihak yang memiliki kuasa dengan mewujudkan pengelolaan dengan baik. Revitalisasi wisata merupakan upaya untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas wisata pantai yang menurun karena berbagai faktor seperti kerusakan lingkungan, perubahan pola pikir masyarakat, dan kebijakan yang kurang memadai.

Revitalisasi wisata pantai adalah menilai kondisi pantai secara keseluruhan, termasuk mengukur kualitas air laut, pantai, lingkungan dan menilai infrastruktur pariwisata yang ada (Panigoro et al., 2023). Penilaian ini dapat membantu menentukan perbaikan apa yang diperlukan dan seberapa tepat pantai tersebut menjadi potensi wisata. Selain daripada itu, salah satu strategi penting untuk menghidupkan kembali wisata pantai adalah dengan meningkatkan kebersihan dan keindahan pantai (Laming et al., 2023) Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki program pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan pantai, memperbaiki fasilitas umum seperti tempatsampah, kamar mandi, dan tempat ibadah.

Keamanan dan kenyamanan wisatawan juga menjadi faktor penting dalam merevitalisasi wisata pantai (Nasution et al., 2023). Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan di pantai, memberikan pelayanan keamanan seperti pengawalan pantai, memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, mengamankan jika terjadi keributan. Selain itu, perlu dipastikan fasilitas yang memadai seperti tempat parkir,

penginapan dan pelayanan penunjang lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan (Rahardyan et al., 2021). Posisi seperti di atas dapat diberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkannya dalam pengelolaan wisata, kemudian mengadakan pelatihan pengelolaan wisata masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola dan mempromosikan wisata pantai tersebut.

2. Asset Based Community Development (ABCD)

Asset based community development merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam upaya pembedayaan ekonomi masyarakat yang menekankan pada optimalisasi pemanfaatan asset dan potensi internal masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari pada masyarakat itu sendiri, hal ini tentu berbedar dari model atau pendekatan pemberdayaan lainnya yang lebih cenderung menitikberatkan pada hulu dari permasalahan yang ada (Haines, 2016). Konsepsi *Asset based community development* membangun asumsi bahwa potensi sebagai bagian dari sumber daya yang memberdayakan masyarakat yang paling efektif dan efisien. Masyarakat membangun optimisme diri untuk mengembangkan dan memposisikan dirinya sebagai produsen dalam rangka mencapai kesejahteraannya sendiri, daripada hanya bergantung secara pasif dari pihak luar saja (Caroline et al., 2000).

Pendekatan *asset based community development* mengedepankan pada program untuk mengentaskan problematika ekonomi dalam komunitas masyarakat, ABCD berpandangan bahwa masyarakat lokal sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Proses pembedayaan konsep ABCD meliputi antara lain inventarisasi dan pemetaan potensi dalam masyarakat yang kemudian membangun relasi dan konektivitas antar sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Raharjo & Setiawan Kusmulyono, 2021) Memafaatkan secara optimal kekuatan dalam internal masyarakat sebagai jembatan untuk peberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan dengan mendeskripsikan potensi apa saja yang ada dilingkungan masyarakat itu sendiri. *Asset based community development* memiliki 5 (lima) konsep utama yang paling mendasar dalam pengembangan masyarakat, yaitu aset manusia, aset sosial, aset fisik (sarana dan prasarana), aset modal, dan aset lingkungan (Haines, 2016)

Pertama, yaitu aset manusia (*human capital*). Manusia sebagai aset dilihat dari aspek karakteristik masyarakat secara individu. Aspek ini biasanya melihat kapabilitas individu masyarakat akan kemampuan dan keterampilan dalam berkerja dikarenakan berpengaruh pada tingkat produktifitas. untuk itu pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan kesehatan solusi untuk penguatan kualitas dan kapabilitas aset ini.

Kedua, aset sosial (*social capital*). konsep ini melihat bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat jaringan hubungan sosial yang mengakar seperti lembaga atau organisasi masyarakat. Lembaga atau organisasi masyarakat ini sebagai wadah yang menyatukan masyarakat atas dasar visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketiga, aset fisik (*physical capital*). Aset fisik berorientasi pada bangunan dan infrastruktur. Bangunan fisik meliputi rumah, perkantoran, pertokoan, gedung, tempat perniagaan dan lain sebagainya. Infrastruktur aset dapat berupa sarana mobilitas transportasi seperti jalan raya, angkutan barang, angkutan penumpang, jembatan, sanitasi dan sarana air bersih.

Keempat, aset modal (*financial capital*). Aset modal merupakan aset yang urgen sebagai pondasi utama dalam proses produksi. Lembaga perbankan dan keuangan lainnya memiliki peran penting dalam mengantisipasi atas permasalahan aset modal ini.

Kelima, aset lingkungan (*environmental capital*). Aset ini menjadi bagian pondasi dasar masyarakat, udara, air, tanah, flora dan fauna, dan sumber daya alam lainnya yang secara teknis pemanfaatannya dapat diakses secara langsung, sebagai pendukung pengembangan dan pemberdayaan yang akan dilakukan.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan bagian dari hilirisasi dari pengembangan potensi aset (Putra et al., 2019). *Output* dari pemberdayaan yang akan melahirkan keterampilan dan sumberdaya yang dihasilkan akan dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan melahirkan kembali optimisme komunitas masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat hal yang paling urgen dilakukan adalah bagaimana memformulasikan pengembangan terhadap akses permodalan sehingga *output*-nya terciptanya lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, hal ini tentunya menunjukkan pada realisasi pengembangan itu bagian dari membangun aset atau membangun potensi masyarakat.

Konsep pemberdayaan dimaknai sebagai kolaborasi sosial yang terorganisir dalam rangka membuat perencanaan dan tindakan kolektif, sebagai upaya pemecahan masalah sosial yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Sebagai sebuah konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai sosial sebuah paradigma baru pembangunan yang berorientasi pada *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (kolaborasi), *empowering* (berdayakan), *sustainable* (keberlanjutan). (Armoyu, 2013)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata pantai lampu satu, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke. Pemilihan lokasi dikarenakan termasuk objek wisata yang mudah diakses dan memiliki potensi wisata namun kurang perhatian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni, mengumpulkan data-data dilapangan yang memiliki korelasi dan relevansi dengan subansi penelitian yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang isu-isu prioritas dan strategis *collaborative governance* revitalisasi di kawasan wisata pantai Lampu Satu melalui pendekatan *asset based community development*.

Teknik pengumpulan data menggunakan inventarisasi data secara primer dan sekunder. Untuk data primer didapatkan berdasarkan data empiris lapangan melalui teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber data pendukung. Hal ini dilakukan dari berbagai sumber referensi dari buku, jurnal atau media online lainnya (Mastanora et al., 2023).

Teknik pengumpulan data digunakan adalah teknik wawancara dan *interview*. Melalui proses wawancara peneliti mendapatkan data serta informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan, teknik analisis data digunakan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Karunia & Ahdiyana, 2024).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Aset Wisata Pantai Lampu Satu berbasis ABCD

Revitalisasi Ojek wisata Lampu Satu diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memberdayakan asset-aset wisata yang integrasi dengan atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang ada yang selama ini tidak begitu mendapat perhatian yang memadai. Rivitalisasi perpaduan kreativitas masyarakat yang dapat menarik daya minat wisatawan dalam berkunjung ketempat wisata yang di dukung oleh akomodasi serta fasilitas yang dipadukan dengan pengelolaan alam atau objek wisata pantai yang ada. Pantai Lampu satu merupakan salah satu pantai andalan masyarakat kota Merauke. Sehingga tidak mengherankan jika setiap hari-hari libur menjadi pilihan masyarakat kota untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga sambil menikmati keindahan panorama pantai. Ada beberapa potensi yang dimiliki pantai Lampu Satu yaitu:

Pertama, Pemandangan alam. Lampu Satu terletak di pesisir pantai Merauke, yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Pantai dengan pasir putih, laut yang jernih, serta matahari terbenam yang spektakuler dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Asset alam yang dimiliki oleh pantai Lampu Satu menjadi *environmental* yang berkelanjutan apabila dikelola secara proporsional oleh masyarakat dan tentunya tidak bisa dinafikan dari adanya dukungan dari pemerintah.

Kedua, Produksi Kapal Motor (KM) nelayan, potensi untuk aktivitas seperti pembuatan kapal motor sebagai media utama *snorkeling, diving*, dan perjalanan mencari ikan. Pembuatan kapal nelayan ini memang berlokasi di pesisir pantai Lampu Satu, menjadi pemamandangan tersendiri dan menjadi edukasi bahari kepada generasi Z dan masyarakat penikmat wisata bahari. Pembuatan kapal dan renovasi kapal nelayannya ini dilakukan oleh masyarakat Lampu Satu, tentunya hal sebagai bagian *human capital* yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam produksi kapal nelayan dalam skala besar.

Ketiga, Wisata budaya, Masyarakat asli Papua yang tinggal di sekitar Lampu Satu memiliki budaya yang kaya dan unik. Potensi untuk menyelenggarakan acara budaya, seperti pertunjukan tarian dan permainan tradisional Marind seperti memanah, musik berburu, dan festival adat, dapat menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Sebagai pantai wisata budaya, pantai Lampu Satu tersedia panggung seni

sebagai tempat diadakan pertunjukan seni budaya suku Marind dan suku lainya yang ada di sekita pantai wisata Lampu Satu.

Keempat, Ekowisata: Potensi untuk mengembangkan program ekowisata yang berkelanjutan di sekitar Lampu Satu. Ini bisa melibatkan tour alam, pengamatan burung, dan kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam upaya konservasi. Pantai Lampu Satu terdapat hutan bakau, sehingga menambah akselerasi sebagai pantai ekowisata yang berkelanjutan, dan ini tentunya bagian dari kekayaan hayati (*environmental capital*), yang menjadi asset alam yang secara teknis dapat diakses secara langsung oleh masyarakat sebagai upaya dari pengembangan dan pemberdayaan ekowisata atau wisata alamiah yang berkelanjutan.

Kelima, Kuliner Lokal: Merauke memiliki kekayaan kuliner lokal yang patut dicoba oleh wisatawan. Makanan khas Papua seperti ikan bakar, sagu, dan hidangan laut segar dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang mencari pengalaman kuliner yang autentik. Kuliner dan wisata menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan satu sama lain, dan hal ini menjadi faktor yang urgen dalam menompang keberlanjutan dari pengembangan wisata pantai Lampu Satu serta menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Keenam, Wisata Sejarah dan Budaya: Ada potensi untuk mengembangkan tour sejarah dan budaya yang mengunjungi situs-situs bersejarah dan pusat kebudayaan di sekitar Lampu Satu. Hal ini dapat mencakup kunjungan ke kampung-kampung (desa) adat, museum lokal, dan tempat-tempat bersejarah penting. Pantai Lampu Satu memiliki keunikan tersendiri dikarenakan masyarakat yang mendiami wilayah pantai Lampu Satu dan sekitarnya bukan hanya penduduk asli papua, namun juga para pendatang yang sudah turun tumurun mendiami wilayah tersebut, khususnya dari masyarakat suku Bugis, dari pulau Sulawesi bagian selatan. Sehingga menampilkan nuansa edukasi akan sebuah toleransi yang tinggi diantara pendatang dengan penduduk asli Papua.

Wisata Lampu Satu sebagai wahana wisata sejarah dan budaya ini menjadi bagian dari aset sosial (*social capital*). Kehidupan masyarakat pantai Lampu Satu terdapat jaringan hubungan sosial yang mengakar yang tergabung dalam satu organisasi Kampung (desa). Kampung atau Desa ini menjadikan masyarakat terhimpun sebagai wadah yang menyatukan masyarakat atas dasar visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Upaya Revitalisasi Objek Wisata Lampu Satu

Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi suatu kelompok masyarakat. Beberapa konsep program pembangunan masyarakat yang dijadikan sebagai rujukan dalam implementasi program, salah satunya yakni pembangunan yang berlandaskan pada masyarakat sendiri (*Community Based Development*). *Community Based Development* merupakan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat atau dengan istilah lain disebut *driven development* (Rahayu et al., 2022). Teori ABCD (Asset Based Community

Development) menjadi program pemberdayaan yang berbasis kepada masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk merancang program pemberdayaan yang dimulai dengan proses identifikasi dan mobilisasi aset yang dimiliki suatu wilayah. Aset-aset yang dimiliki selanjutnya diklasifikasi yang selanjutnya dicocokkan dengan masyarakat dalam hal ini masyarakat di wilayah pantai Lampu Satu Merauke, Papua Selatan. Terdapat beberapa komponen dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset Based Community*, di antaranya; *problem based approach*, *need based approach*, *asset based approach*, dan sumber daya alam (Edi, 2020).

Pantai Lampu Satu merupakan salah satu pusat hiburan yang berada di pinggiran kota Merauke, distrik Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan. Pantai ini menjadi salah satu aset wisata serta potensial untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata bagi masyarakat lokal setempat. Sebagai ruang wisata, (Ramli et al., 2023) pengembangan pantai Lampu Satu menjadi kawasan ekowisata dan sumber pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka ada beberapa program revitalisasi pantai yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat dan bekerjasama dengan pemda terkait, di antaranya; penanaman bakau masyarakat bersama TNI AL, pembatasan lokasi pembuatan kapal nelayan oleh dinas pariwisata, pembuatan gapura oleh dinas pariwisata dan masyarakat setempat, pembuatan pos Badan Keamanan Laut (Bakamla) oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut XI (Lantamal XI). Berdasarkan program-program tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Upaya Revitalisasi Pantai Lampu Satu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Penanaman bakau masyarakat bersama TNI AL	Program ini dilakukan masyarakat bersama TNI Angkatan Laut dalam rangka menjaga kelestarian alam sekitar pantai dan untuk mencegah terjadinya erosi pantai.
2	Pembatasan lokasi pembuatan kapal nelayan oleh dinas pariwisata	Kegiatan pembuatan kapal dilakukan oleh masyarakat setempat di daerah pantai sehingga dilakukan pembatasan lokasi oleh dinas pariwisata dalam rangka menertibkan tata ruang pantai Lampu Satu. Dalam hal ini, masyarakat tidak dibatasi untuk membuat kapal, hanya saja lokasi pembuatannya yang dibatasi agar lebih tertib.

3	Pembuatan gapura oleh dinas pariwisata dan masyarakat setempat	Pembuatan gapura dilakukan oleh dinas setempat dan bekerjasama dengan masyarakat. Pembuatan gapura ini bertujuan untuk menertibkan regulasi pengunjung.
4	Pembuatan pos BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) oleh Lantamal XI	Pembuatan pos BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) dilakukan oleh Lantamal XI bekerjasama dengan masyarakat setempat. Pembuatan pos ini bertujuan untuk memantau aktivitas pengunjung, dalam hal ini sebagai pusat keamanan pengunjung pantai.



Gambar 4. 1. Wawancara dengan



Gambar 4.2 Wawancara dengan Dinas



Gambar 4.3 Wawancara dengan Masyarakat



Gambar 4.4 Wawancara dengan Masyarakat

Berdasarkan kegiatan revitalisasi pantai yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui upaya revitalisasi dapat dikembangkan di Pantai Lampu Satu menggunakan pendekatan ABCD (*Assesed Based Community Development*). Revitalisasi menjadi sebuah upaya yang dapat dilakukan dalam rangkaian pemberdayaan masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi (Ansori, 2019) berbasis pada aset lokal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah potensi masyarakat setempat.

3. Penerapan *Assesed Based Community Development* (ABCD)

Partispasi Masyarakat

Partispasi masyarakat dapat diketahui dari keaktifan masyarakat dalam setiap kegiatan revitalisasi pantai Lampu Satu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada pelaksanaan penanaman bakau bersama TNI AL, masyarakat terlibat secara langsung dalam proses penanaman pohon. Sementara dalam proses perencanaan kegiatan, pihak-pihak yang terlibat hanya TNI AL dan ketua RT dan RW saja. Pada proses perencanaan, pihak TNI AL berkoordinasi dengan ketua RT dan RW dalam hal merumuskan lokasi penanaman bakau. Penanaman ini dilakukan secara momentum dengan mengamati kondisi pantai.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, masyarakat secara langsung ikut menanam pohon bakau. Perempuan juga ikut terlibat dalam penanaman pohon bakau dan tetap dikontrol oleh RT dan RW masing-masing. Keterlibatan perempuan dalam hal ini menjadi wujud kesetaraan masyarakat dalam hal gender. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh TNI AL adalah monitoring dan evaluasi hasil penanaman pohon bakau. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pertumbuhan pohon bakau yang telah ditanam bersama dengan masyarakat setempat.

Kegiatan pembatasan pembuatan kapal nelayan dilakukan oleh dinas pariwisata setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menata pantai agar menjadi lebih rapi. Pada kegiatan ini, perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Meskipun demikian, dampak dari kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh pengunjung pantai.

Pembuatan gapura dirancang oleh Dinas Pariwisata. Pembuatan Gapura ini dimaksud agar regulasi pengunjung tempat wisata Pantai Lampu Satu jadi lebih terarah dan teratur. Pada proses pembuatan gapura, Dinas Pariwisata melibatkan masyarakat untuk bergotong royong dalam penyelesaian gapura tersebut. Pada proses evaluasi, Dinas Pariwisata memantau secara langsung gapura tersebut. Sedangkan pada pembuatan pos BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) oleh Lantamal XI. Pos ini dibuat untuk memantau aktivitas pengunjung, dalam hal ini sebagai pusat keamanan pengunjung pantai. Pada proses perencanaannya, Lantamal XI tetap berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat, serta masyarakat pada umumnya. Begitu pula pada proses pembuatan dan evaluasinya

Pelestarian Lingkungan Hidup

Upaya pelestarian lingkungan hidup telah dilakukan oleh masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah revitalisasi patai melalui program penanaman bakau untuk menghindari dampak erosi pantai. Penanaman bakau juga dapat dimanfaatkan sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan di sekitar pantai. Selain itu, masyarakat dan pengelola wisata juga melakukan pembersihan lingkungan secara berkala di sekitar pantai. selain itu, pemerintah juga melakukan pembatasan ruang pada pembuatan kapal yang dilakukan masyarakatsekitar pantai sebagai upaya dalam menjaga keasrian dan tata ruang pantai dalam hal ini sebagai objek wisata.

Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Pemerataan pendapatan masyarakat di kawasan Pantai Lampu Satu dilakukan dengan menyediakan ruang bagi masyarakat setempat untuk berjualan di sepanjang pantai. masyarakat dapat berdagang apa saja di pantai, mulai dari makanan, minuman, bahkan permainan anak. Untuk menghindari kecemburuan antara masyarakat, maka disediakan lapak khusus bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Lapak tersebutdapat digunakan oleh masyarakat secara bergiliran. Selain itu, masyarakat juga dapatberdagang menggunakan kendaraan pribadinya.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah terkait regulasi tempat wisata di Pantai Lampu Satu menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap tempat wisata dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata tersebut. Partisipasi masyarakat dalam upaya revitalisasi dilakukan sesuai dengan gradasi, derajat wewenang, dan tanggung jawab yang terlihat dari setiap program atau kegiatan yang dilakukan. Pada beberapa program revitalisasi yang dilakukan, pemerintah tetapberkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat. Selanjutnya pada proses eksekusi, masyarakat secara umum terlibat secara aktif, baik itu perempuan maupun anak muda. Partisipasi masyarakat dalam upaya revitalisasi pantai termaksud dalam kategori partisipatif dan tetap dalam kontrol masyarakat karena melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangann potensi desa wisata Lampu Satu melalui revitalisasi objek wisata melalui pendekatan *asset based community development* di pantai Lampu Satu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Potensi wisata yang dimiliki oleh objek wisata Lampu Satu berupa, pemandangan alam yang natulistik, produksi kapal motor nelayan dalam jumlah besar, kuliner tradisional, adanya taman bakau yang terjaga kelestariannya, dan budaya

masyarakat pantai yang homogen antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang mendiami wilayah pantai Lampu Satu.

Kedua, Keaktifan masyarakat dalam kegiatan revitalisasi pantai Lampu Satu dapat menjadi upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas tempat wisata pantai di kabupaten Merauke.

Ketiga, Penerapan konsep ABCD (*Asses Based Community Development*) dalam program revitalisasi pantai Lampu Satu dapat terlihat melalui keaktifan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai aset yang ikut menunjang aset-aset lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, T. (2019). Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(1), 34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3544714>
- Armoyu, H. M. (2013). Pemberdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- Caroline, H., Kazmer, M. M., Robins, J., & Shoemaker, S. (2000). Community Development among Distance Learners: Temporal and Technological Dimensions. *Journal Of Computer & Mediated Communication*, 6(1), 12.
- Edi, I. (2020). *Model Pengabdian Berbasis Kompetisi*. Haines,
- Gary Paul Green & Anna. (2016). *Asset Building and Community Development*.
- Hendrik, H., Hendri, R., & Yolandika, C. (2021). Impact of the Covid-19 Pandemic on Activities Socio-Economic Floating Net Cages (FNC) Business in the Koto Panjang Hydropower Reservoir, Riau Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 934(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/934/1/012037>
- Ismail, I., & Mas, N. A. (2022). Sinergitas Konsep Maqashid Al-Syariah Dengan Realisasi Wisata Di Kabupaten Bone. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 24–35. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2921>
- Karunia, D. P., & Ahdiyana, M. (2024). *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang Studi Kasus Pada Agro Wisata Dusun Semilir Pasca Pandemi Covid-19 Tourism Development Strategy In Semarang District Case Study On Agro Tourism In Semilir Village Post Covid-19 Pandemic berbagai aspek. 09.*
- Kristanto, T. B. A., & Aishya Putri, A. (2021). Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kesehatan di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.22146/jsds.2272>

- Laming, A., Engka, D. S. ., & Sumual, J. I. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Sangehe (Studi: Pantai Ria Kolongan Beha). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 85–96.
- M. Anam Rahardyan, Loekman Mohamadi, & Wawan Destiawan. (2021). Perancangan Kawasan Wisata Telaga Mangunan di Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. *SARGA: Journal of Architecture and Urbanism*, 15(2), 28–38. <https://doi.org/10.56444/sarga.v15i2.151>
- Masjhoer, J. M. (2020). *Pengantar Wisata* (Issue July).
- Mastanora, R., Lovina, G., & Mastanora, R. (2023). Peran Komunikasi Eksternal Organisasi dalam Proses Revitalisasi Objek Wisata Alahan Panjang Resort di Kabupaten Solok. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 70. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v5i1.9276>
- Nasution, R. T., Fuady, M., & Haiqal, M. (2023). Identifikasi Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki Kawasan Wisata Bersejarah di Pusat Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 6(4), 72–78. <https://doi.org/10.24815/jimap.v6i4.21223>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Panigoro, C., Paramata, A. R., Kasim, F., & Akase, M. N. F. (2023). Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan Wisata Pantai Tilalohe, Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. *Journal of Marine Research*, 12(1), 7–18. <https://doi.org/10.14710/jmr.v12i1.35466>
- Putra, F., Usman, S., & Yusuf, M. (2019). Pemberdayaan pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 83–88. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.83-88>
- Raharjo, T., & Setiawan Kusmulyono, M. (2021). Pendekatan Asset-Based Community Development dalam Mengelola Bumdesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang. *PERWIRA - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 4(2), 91–102. <https://doi.org/10.21632/perwira.4.2.91-102>
- Rahayu, H. A., Istikhomah, I., Fatmawati, N., Usami, R. W., Dari, F. U., & Habib, M. A. F. (2022). Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. *Greenomika*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2022.04.1.4>
- Rahma, N. A. A. (2021). Kemampuan Masyarakat dalam Mengungkap Potensi Desa (Sebuah Aksi Partisipatorif Dalam Perencanaan Desa Wisata Di Desa Tritik ,

Nganjuk) The Ability Of The Community In Uncovering the Potential of the Village (A Participatory Action in The Planning of to. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR, dan Pemberdayaan*, 6(1), 82–90.

Ramli, R. B., Hanipah, S., & Majid, I. (2023). *Sosialisasi Strategi Pengembangan Ekowisata Pantai Lampu Satu Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal*. 32–37.

Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *Melancong Ke Laut*.

Rinjani, E. D., Farda, U. J., Himawati, U., Sari, R. L., & Putri, L. I. (2024). *Developing The Welfare of The Fatayat Group of Mangunsari Village Gunungpati Semarang Through Socioecopreneurship Pengembangan Kesejahteraan Kelompok Fatayat Desa Mangunsari Gunungpati Semarang melalui Socioecopreneurship*. 8(2), 611–620.